

ABSTRAK

Tanah merupakan salah satu sumber alam dan menjadi kebutuhan mendasar bagi manusia. Mayoritas masyarakat desa bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga sangat membutuhkan lahan pertanian berupa tanah sawah untuk bercocok tanam. Maka dari itu, pemerintahan desa memiliki wewenang terkait pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa dalam rangka meningkatkan aspek pembangunan dan nilai ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk, (1) Mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa di Desa Boyolali, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, (2) Mendeskripsikan hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa di Desa Boyolali, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan secara yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah Desa Boyolali, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa dimulai dari pemerintah desa menentukan susunan panitia lelang, membuat daftar tanah yang akan dilelang, membuat tata tertib, tahap pengumuman, pelaksanaan pelelangan, pemilihan pemenang lelang, terbitnya surat keputusan kepala desa tentang lelang, dan terakhir adalah penandatanganan kontrak.

Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa terjadi karena beberapa faktor yang menimbulkan hambatan baik secara internal maupun secara eksternal.

Kata Kunci : tinjauan yuridis, sewa menyewa, tanah kas desa

Abstract

Land is one of the natural resources and is a fundamental need for humans. The majority of villagers work as farmers. So it really needs agricultural land in the form of rice fields for farming. Therefore, the village government has the authority regarding the implementation of the village treasury land lease agreement in order to improve aspects of development and economic value in accordance with applicable laws and regulations. This study aims to, (1) Describe the implementation of the village treasury land lease agreement in Boyolali Village, Gajah District, Demak Regency, (2) Describe the obstacles and solutions in implementing of land leasing agreements in Boyolali Village, Gajah District, Demak Regency.

This research is based on legal research conducted with a sociological juridical approach. The location of this research is Boyolali Village, Gajah District, Demak Regency. The analytical tool used in this study is qualitative analysis methods.

The results of the study show that the implementation of the village treasury land lease agreement , starts with the village government to determine the composition of the auction committee, make a list of land to be auctioned, establish an order, the announcement stage, conduct the auction, select the auction winner, issue a village head's decree regarding the auction, and finally the signing contract.

Meanwhile, obstacles in the implementation of village treasury land lease agreements occur due to several factors that cause obstacles both internally and externally.

Keywords: juridical review, lease, the village treasury of land